

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBELUM PANDEMI DAN SAAT PANDEMI COVID-19 TAHUN 2019-2021

Dyah Palupi¹; Dassaad²; Riyanti³; Budi Wahyudi⁴

Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Email : dypalupi@staff.gunadarma.ac.id¹; dassaad_z@staff.gunadarma.ac.id²;
riyanti_d@staff.gunadarma.ac.id³; budiwahyudi@staff.gunadarma.ac.id⁴

ABSTRAK

Penilaian Kinerja Pemerintah daerah Riau Pada sebelum Pandemi 2019-2021 dan Selama Pandemi Covid-19 Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan Riau dalam menjalankan pemerintahannya sendiri Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Penilaian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan Pelaksanaan APBN Riau Tahun 2019-2021. Rasio keuangan adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kepulauan Riau. Rasio keuangan ini terdiri dari rasio diferensiasi, rasio independensi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kompatibilitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sedang, rasio kemandirian berada dalam pola hubungan partisipatif, dan rasio efisiensi dan efektivitas menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pertumbuhan belanja menunjukkan hasil positif dan negatif. Salah satu penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang saat ini melanda Indonesia.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah;, APBD; Rasio Keuangan Daerah; Pandemi COVID-19; Pendapatan Daerah, Belanja Daerah

ABSTRACT

Riau Regional Government Performance Assessment Before the 2019-2021 Pandemic and During the Covid-19 Pandemic This evaluation was carried out to determine Riau's ability to run its own government. The Riau Archipelago Province is an area that borders directly with neighboring countries. This assessment uses a quantitative method and uses secondary data in the form of a report on the Implementation of the 2019-2021 Riau State Budget. The financial ratio is the ratio used to assess the financial performance of the Riau Islands Government. These financial ratios consist of differentiation ratios, independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, compatibility ratios, and growth ratios. This study shows that the degree of fiscal decentralization can be categorized as moderate, the ratio of independence is in a participatory relationship pattern, and the ratio of efficiency and effectiveness shows fluctuating results. . Spending growth shows both positive and negative results. One of the causes is the Covid-19 pandemic that is currently hitting Indonesia.

Keywords : Regional Financial Performance; APBD, Regional Financial Ratios; COVID-19 Pandemic; Regional Income; Regional Expenditure

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang luar biasa di berbagai bidang kehidupan, yang paling utama adalah bidang kesehatan, dimana kesehatan masyarakat diserang akibat wabah COVID-19. Tidak ada industri lain yang tidak terkena dampak terhadap pandemi Covid-19 hal ini juga berdampak pada perekonomian global dan perekonomian Indonesia. Banyak negara di dunia yang memberlakukan pembatasan mobilisasi di luar rumah untuk meredam kasus positif, dan Indonesia juga memberlakukan pembatasan mobilisasi bahkan *lockdown* (Putri & Munandar, 2021; Rawis et al., 2020).

Pembatasan dan penutupan aktivitas di luar rumah mempersulit masyarakat untuk tetap beraktivitas dan menurunkan perekonomian masyarakat. Karena pandemi COVID-19, banyak kantor, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata tutup. Dampak lain dari pandemi adalah meningkatnya pengangguran akibat PHK oleh perusahaan yang terkena dampak pandemi. Kinerja merupakan hasil evaluasi dari kegiatan yang dilakukan, dan hasil dari kegiatan tersebut biasanya diperiksa terhadap standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai hasil evaluasi kegiatan atau program yang mengukur kemampuan suatu daerah untuk mencapai otonomi daerah (Rahnayanti, 2016; Zuhri & Soleh, 2016).

Berdasarkan Pasal 1(7) Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah anggaran administrasi negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk jangka waktu tetap atau tahunan. Anggaran dan pendapatan daerah didokumentasikan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah negara bagian dalam bentuk Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kotamadya adalah badan publik yang memberikan informasi dan layanan kepada kotamadya, salah satunya bertanggung jawab atas administrasi ekonomi lokal dan membuat keputusan yang berpihak pada penduduk setempat.

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting bagi pertumbuhan daerah, karena pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memajukan daerah, yang semuanya mempengaruhi bagaimana daerah mengelola perekonomian daerah akan Laporan kinerja anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan operasional yang terdiri dari penerimaan,

pengeluaran, dan surplus atau defisit dibandingkan tahun sebelumnya untuk periode tertentu (Assidiqi, 2016; Saputra, 2016).

Kepulauan Riau adalah provinsi ke-32 di Indonesia dan termasuk wilayah kabupaten Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Karimun, Natuna, dan Lingga. Secara total, wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 provinsi dan 2 kota, 42 kecamatan dan 256 kecamatan/desa, dengan total 2.408 pulau besar dan kecil, total wilayahnya 252.601 Km², dimana 95% laut dan hanya 5% derajat daratan.

Penilaian kinerja anggaran provinsi dan pendapatan bersumber dari sumber daya alam. Pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, perkebunan. Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi pemerintah daerah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Dengan adanya pandemi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan: Aria Bima (2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 masih sangat bergantung pada pemerintah, dengan sekitar 65% pendapatan berasal dari provinsi. Berita Anatara (2021). Pasca pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020, Pemda Riau selama ini sangat terpukul, namun pada tahun 2021 pendapatan asli daerah Riau meningkat. Namun, defisit Pemprov Riau TA 2021 mencapai sekitar Rp.518 miliar karena beberapa daerah gagal memenuhi target pendapatan asli (PAD). Ada beberapa target awal pendapatan daerah yang belum terpenuhi, seperti pendapatan dari jasa jangkar, biaya RZWP3K, dan pemotongan Dana Alokasi Umum Negara (DAU) pemerintah daerah, sebesar 50% dari total Rp 1,1 triliun telah tercapai Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti analisis yang berjudul, “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021”

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Poyoh et al. (2017) mengatakan bahwa kinerja ekonomi daerah menggambarkan hasil daerah. Output ekonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengelola dan menghasilkan aliran pendapatan daerah dalam mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari laporan pendapatan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa hasil keuangan merupakan indikasi dari apa yang telah dicapai daerah untuk memenuhi kebutuhan dan

kepentingan daerah sehingga dapat berkembang lebih baik lagi (Machmud, 2014; Ronald, 2014).

Pemerintah daerah dituntut untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, menilai efisiensi dan efektifitas dan sejauh mana efisiensi daerah digunakan dalam penggunaan pendapatan daerah, mempertimbangkan peran masing-masing aliran pendapatan dalam perolehan pendapatan daerah untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu (Pilat & Morasa, 2017; Muthia, 2016).

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah informasi yang disediakan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi, dan keputusan yang dibuat dapat memberikan dampak positif bagi pengguna informasi tersebut meningkat (Kawatu, 2019; Poyoh et al., 2017; Sijabat et al., 2014)

Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ikhtisar transaksi selama satu periode atau tahun anggaran, dan laporan keuangan digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dll. Menurut PSAP No. 24 (2005).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Halim (2007) dan Sinambela (2016), anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran yang bertujuan untuk mendanai kegiatan operasional daerah selama tahun anggaran tertentu.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana pengelolaan kas daerah yang ditetapkan setiap akhir tahun anggaran atau pada akhir periode penyelesaian kegiatan operasional daerah.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu rumus yang digunakan untuk menilai perkembangan suatu perusahaan atau daerah, dengan menggunakan laporan keuangan periode tertentu sebagai bahan analisis atau anggaran tahun tertentu sebagai bahan evaluasi atau penjelasan ke depan (Karlina & Handayani, 2017; Dora, 2017).

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi merupakan kesanggupan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar lebih baik lagi untuk mendanai pembangunan daerah (Dharmawati, 2016). (Tabel 1)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunannya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang telah memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak dan retribusi, sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio yang menyatakan kemampuan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut (Kawatu, 2019). (Tabel 2)

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Tingkat efektivitas pendapatan daerah adalah kemampuan pemerintah untuk mencapai pendapatan awal daerah yang diproyeksikan terhadap target yang telah ditentukan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Pangkey et al., 2017). Menurut Halim (2007), semakin besar realisasi pendapatan PAD dibandingkan dengan tujuan pendapatan PAD, maka semakin efektif pendapatan PAD, begitu pula sebaliknya. (Tabel 3)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio antara total pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang sebenarnya dihasilkan, semakin rendah rasio yang dicapai, semakin tinggi efisiensinya (Ropa, 2016). (Tabel 4)

5. Rasio Keserasian

Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana untuk dibelanjakan pada perangkat daerah dan pelayanan publik daerah. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja daerah, semakin rendah persentase belanja layanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat (Mohamad Mahsun, 2006).

6. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Laju pertumbuhan dipakai untuk menghitung kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil dari periode sebelumnya. Setelah memahami pertimbangan untuk setiap komponen APBD, dapat mempertimbangkan komponen mana yang perlu Anda tangkap.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2019 – 2021.

Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2019-2021 yang didapati dari website resmi Kepri.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Adalah dengan Menggunakan metode Rasio Keuangan APBD.

Perhitungan Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Berikut:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$RDDF = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$R.Efektivitas = \frac{PAD}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Realisasi B. Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total B. Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Persentase Rasio Pertumbuhan.

pn = Total Komponen APBD tahun ke-n.

P0 = Total Komponen tahun sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi adalah kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatannya agar lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mendanai pembangunan daerah (Kusumadewi & Illat, 2016).

Berdasarkan Tabel 5, penilaian sebelum pandemi terhadap derajat desentralisasi fiskal tahun 2019 sebesar 33,29%. Derajat desentralisasi fiskal tahun 2020 selama pandemi Covid-19 meningkat menjadi 34,02% Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, pajak daerah, hasil pemisahan barang, dan PAD lain yang sah.

Tingkat desentralisasi fiskal meningkat sebesar 36,11% pada tahun 2021 selama pandemi. Peningkatan pendapatan asli daerah juga disebabkan adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah wajib lainnya. Tingkat desentralisasi fiskal akan menjadi terendah pada tahun 2019 dan tertinggi pada tahun 2021. Rata-rata rasio diversifikasi fiskal adalah 34,47%

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya. Misalnya membayar pajak dan biaya seperti aliran pendapatan lokal lainnya. Rasio ini adalah rasio yang menyatakan kesanggupan. Semakin tinggi rasio ini semakin besar kemandirian keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 6, Penilaian angka kemandirian pra pandemi tahun 2019 sebesar 49,94% dan peningkatan kejadian pandemi pada tahun 2020 menjadi 51,59% pada tahun 2021 dan cukup besar sebesar 57,16%. Penilaian Tingkat Kemandirian Keuangan tahun 2019 mengikuti pola konsultatif dan pola partisipatif pada tahun 2020-2021. Artinya, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena hampir mencapai tingkat otonomi daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kemandirian finansial rata-rata sebesar 52,89% dan tergolong partisipatif. Artinya, peran pemerintah pusat mulai menurun dan pemerintah daerah mulai mencapai tujuan otonomi daerahnya sendiri atau daerah dapat mendanai kegiatan pemerintah mereka sendiri.

Rasio Keefektivitasan Keuangan Pendapatan Daerah

Rasio keefektivitasan pendapatan daerah adalah kesanggupan pemerintah untuk mencapai pendapatan awal yang diproyeksikan untuk suatu sasaran tertentu berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Halim (2007).

Pada tabel 7, dapat dilihat tingkat keefektivitasan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019-2021 (sebelum dan selama pandemi). Pada tahun 2019, sebelum pandemi, penilaian tingkat keefektivitasan pendapatan masyarakat sebesar 104,70% awal mula pandemi pada tahun 2020 berada di angka 102,55% dan berkurang secara signifikan menjadi 98,80%. Penurunan tarif efektif tahun 2021 disebabkan oleh realisasi pendapatan asli daerah yang tidak memenuhi atau melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan hanya realisasi alokasi daerah yang meningkat.

Perhitungan rata-rata Tingkat Efektivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah 100,8% berada lebih dari 100% pada skala interval dan tergolong Efektivitas. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan tugas dengan baik dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang direncanakan.

Rasio Keefesiensian Keuangan Daerah

Rasio keefesiensian keuangan suatu daerah adalah rasio total pengeluaran terhadap pendapatan yang benar-benar dihasilkan. Semakin rendah rasio yang dicapai, semakin tinggi efisiensinya.

Pada tabel 8 menunjukkan Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019-2021 (sebelum pandemi dan saat pandemi). Pada

tahun 2019 sebelum pandemi penilaian tingkat efisiensi sebesar 80,03%, namun pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 mulai muncul penilaian tingkat efisiensi meningkat menjadi 94,20%, dan pada tahun 2021 saat pandemi meningkat menjadi 97,21%. Peningkatan ini terjadi karena adanya Peningkatan biaya transfer daerah. Pendapatan DAU memberikan kontribusi terbesar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata efisiensi komputasi sebesar 90,48% dan tergolong efisien. Peningkatan tingkat efisiensi ini dapat diartikan bahwa pemerintah provinsi Riau menggunakan uang yang mereka gunakan untuk menghasilkan pendapatan secara lebih efisien. Hal ini juga disebabkan oleh penurunan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dirangkum oleh hampir seluruh komponen belanja: belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Hal ini juga meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Rasio Keserasian Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan biaya atau pengeluaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari jangka pendek yang terdiri dari tenaga kerja, barang dan jasa, dan subsidi.

Berdasarkan Tabel 9, peningkatan belanja perasional dialami oleh semua pos belanja yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya material, biaya hibah, biaya kesejahteraan dan biaya bantuan keuangan. Pada tahun 2021, beban usaha Provinsi Kepulauan Riau melonjak menjadi Rp2.771.185.771.228. Peningkatan belanja operasional pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020, namun peningkatan terbesar pada tahun 2021 adalah belanja barang dan jasa, disusul dengan belanja bantuan sosial yang meningkat signifikan.

Perhitungan rata-rata rasio biaya operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah 78,89%. Perbaikan biaya operasional juga karena kasus Covid-19 yang terkendali dan proses vaksinasi yang terus berjalan. Perbaikan beban usaha lainnya antara lain didorong oleh kenaikan biaya tenaga kerja dan barang dan jasa, dengan work from home (WFH) juga berkontribusi pada penurunan beban usaha. Semakin rendah biaya overhead, semakin baik area tersebut.

Berdasarkan Tabel 10, rata-rata tingkat investasi pemerintah Riau adalah 42,97%. Semakin tinggi produksi barang modal, semakin baik sarana atau prasarana yang akan meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya. Total belanja modal di

Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 633.107.634.788 pada tahun 2019 dan turun menjadi Rp 586.608.798.242 pada tahun 2020. Dan total belanja modal pada tahun 2021 turun signifikan menjadi Rp 338.398.228. Ini juga karena pandemi, karena semua total belanja modal turun, termasuk belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan konstruksi, investasi manufaktur, serta belanja irigasi dan jalan. Pengeluaran modal turun selama pandemi karena pemerintah fokus pada dukungan sosial masyarakat, khususnya kesehatan masyarakat.

Rasio Pertumbuhan Belanja

Laju pertumbuhan dipakai untuk menghitung kemampuan suatu daerah dalam menjaga dan meningkatkan hasil dari periode sebelumnya. Setelah memahami pertimbangan setiap komponen APBD, Anda dapat mempertimbangkan komponen mana yang perlu Anda tangkap.

Perhitungan laju pertumbuhan rata-rata Riau adalah 43,75% menempatkan pertumbuhan belanja daerah dalam kategori positif. Pertumbuhan belanja daerah 2019-2021 mengalami penurunan yang sangat besar. Dari hasil perhitungan Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar Rp204.724.286.234, dan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019- 2020 menurun kemabali diangka Rp157.471.851.287, Peningkatan belanja terbesar terjadi pada tahun 2020-2021 sebesar Rp393.327.478.620. Meningkatnya belanja daerah Riau karena masih berlangsungnya COVID-19. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan penjualan dan peningkatan belanja modal yang signifikan. (Tabel 11)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) secara keseluruhan penilaian kinerja keuangan pendapatan kepulauan Riau dapat dikatakan baik, dengan tingkat desentralisasi fiskal yang sedang; 2) Pemerintah Kepulauan Riau memiliki pola partisipatif dalam rasio kemandiriannya, dengan peran pemerintah pusat yang mulai berkurang mendekati tingkat otonomi daerah; 3) Tingkat efektivitas tergolong efektif. Artinya pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya; 4) Tingkat efisiensi tergolong efisien. Artinya, belanja daerah lebih rendah dari pendapatan daerah; 5) Pada rasio keserasian yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal Pemerintahan Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dimana pada belanja operasi pada tahun 2021 mengalami

penurunan belanja operasi berarti bisa dikatakan. baik untuk daerah, dan untuk belanja modal pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana hal ini dapat dikatakan baik bagi daerah karena tingkat belanja modal yang tinggi maka pembangunan sarana dan prasarana akan sebaik; dan 6) Pertumbuhan Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2021 menunjukkan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang positif, namun cenderung menurun. Penurunan ini juga karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2004). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. *KINERJA*, 8(2), 209-210.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 146-159.
- Dharmawati, M. K. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Dora, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. *Universitas Sanata Darma, Yogyakarta*.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. CV BUDI UTAMA
- Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 14(2).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Pangkey, A. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(3).
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *ACCOUNTABILITY*, 6(1), 45-56.

- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2296-2313.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- Rawis, S. D., Manossoh, H., & Pusung, R. J. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA (TAHUN 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4).
- Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1(1), 31-42.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 236-242.
- Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).
- Widjaja, P. D. H. (2017). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan keuangan Daerah
00,00 – 10, 00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Cukup

30,01 – 40,00%	Sedang
40,01 – 50,00%	Baik
>50.00%	Sangat Baik

Sumber: Purba (2017)

Tabel 2. Skala Tingkat Kemandirian dan Pola Hubungan Keuangan Daerah

Kemandirian Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim (2002)

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Pendapatan Daerah

Kriteria	Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	100
Cukup efektif	90-99
Kurang efektif	75-89
Tidak efektif	<75

Sumber: Mahmudi (2019)

Tabel 4. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria	Efisiensi (%)
Efisien	Kurang dari 100
Efisien berimbang	Sama dengan 100
Tidak efisien	Lebih dari 100

Sumber: Mohamad Mahsun (2013)

Tabel 5. Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi	Kriteria
2019	Rp1.311.704.305.173	Rp3.939.451.004.378	33,29%	Sedang
2020	Rp1.195.637.693.103	Rp3.514.310.183.325	34,02%	(Sedang)
2021	Rp1.375.770.280.701	Rp3.809.875.862.443	36,11%	(Sedang)
Rata - rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal			43,47%	sedang

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Kemandirian	Pola
2019	Rp1.311.704.305.173	Rp2.626.462.699.205	49,94%	Konsultatif
2020	Rp1.195.637.693.103	Rp2.317.188.590.222	51,59%	(Partisipatif)
2021	Rp1.375.770.280.701	Rp2.406.531.963.533	57,16%	(Partisipatif)
Rata - rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			52,89%	Partisipatif

Sumber : Data Diolah (2022)

Tabel 7. Rasio Keefektifitasan Pendapatan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan	Keefektifitasan	Kriteria
2019	Rp1.311.704.305.173	Rp1.260.161.048.669	104,09%	Efektif
2020	Rp1.195.637.693.103	Rp1.165.900.404.289	102,55%	(Efektif)

2021	Rp1.375.770.280.701	Rp1.436.072.735.262	95,80%	(Kurang Efektif)
Rata – Rata Rasio Keefektifitasan			100,80%	Efektif

Sumber : Data Diolah (2022)

Tabel 8. Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Keefisienan	Kriteria
2019	Rp3.153.016.717.443	Rp3.939.451.004.378	80,03%	Efisien
2020	Rp3.310.488.568.730	Rp3.514.310.183.325	94,20%	(Efisien)
2021	Rp3.703.816.047.350	Rp3.809.875.862.443	97,21%	(Efisien)
Rata – rata Rasio Efisiensi			90,48%	Efisien

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 9. Rasio Keserasian pada Pos Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2019	Rp2.519.909.082.654	Rp3.153.016.717.443	79,92%
2020	Rp2.721.582.440.515	Rp3.310.448.568.730	(82,21%)
2021	Rp2.771.185.771.228	Rp3.703.816.047.350	(74,81%)
Rata – rata Rasio Belanja Operasi			78,98%

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 10. Rasio Keserasian pada Pos Belanja Modal

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2019	Rp633.107.634.788	Rp3.153.016.717.443	20,07%
2020	Rp586.608.798.242	Rp3.310.488.568.730	(17,71%)
2021	Rp338.332.228.989	Rp3.703.816.047.350	(91,13%)
Rata – rata Rasio Belanja Modal			42,97%

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun	Realisasi Belanja tahun ke n	Realisasi Daerah tahun n-1	Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan	Pertumbuhan
2019	Rp3.153.016.717.443	Rp.2948.292.431.209	Rp204.724.286.234	69,43%	Positif
2020	Rp3.310.488.568.730	Rp3.153.016.717.443	Rp157.471.851.287	49,94%	(Positif)
2021	Rp3.703.816.047.350	Rp3.310.488.568.730	Rp393.327.478.620	11,88%	(Positif)
Rata – rata Rasio Pertumbuhan Belanja				43,75%	Positif

Sumber: Data Diolah (2022)